

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemerintahan di Indonesia telah berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui perumusan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan (Purwaningtyas, 2024).

Pendidikan adalah komponen esensial dalam peningkatan kualitas individu (Hidayat, 2020). Pendidikan juga merupakan suatu proses yang terencana dan disadari untuk mengembangkan serta mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam rangka mematangkan kepribadian manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan (Assa, 2022). Hal ini dipandang sebagai proses yang berlangsung secara sadar dan terencana dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Melalui proses tersebut, peserta didik diharapkan mampu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang matang, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Pristiwanti, 2022).

Paradigma pendidikan Inklusi telah mengalami perkembangan sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi seluruh peserta didik. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik atau bakat istimewa untuk mendapatkan pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik lainnya (Nadhiroh, 2024). Sekolah yang menerapkan sistem inklusi dituntut untuk menciptakan lingkungan belajar dan menyediakan fasilitas yang ramah dan mendukung (Budianto, 2023).

Pendidik memperoleh kesempatan untuk merancang pembelajaran secara inovatif dan optimal serta mendorong keterlibatan aktif seluruh peserta didik,

terutama peserta didik berkebutuhan khusus (Gustini, 2022). Oleh karena itu, Kurikulum harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan didukung oleh pendidik yang berpengalaman serta didukung terciptanya lingkungan yang inklusi, setiap peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang optimal (Putri, 2025).

Pelaksanaan pendidikan inklusi tidak dapat dipisahkan dari peran manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang sistematis, komprehensif, dan kolaboratif untuk mencapai tujuan kurikulum (Zubair, 2024). Kurikulum yang baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang adaptif dan sesuai dengan keberagaman peserta didik (Hidayat, 2024). Di dalam konteks pendidikan, salah satu objek utama yang memerlukan pengelolaan secara sistematis adalah kurikulum. Sebagaimana dalam QS Al Baqarah ayat 151, Allah SWT berfirman:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

”Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa proses pendidikan meliputi penyampaian materi, pembinaan karakter, serta pengajaran ilmu pengetahuan secara terarah. Kurikulum menjadi komponen penting yang mengatur tujuan, isi, dan proses pembelajaran agar berjalan secara sistematis dan terstruktur. Menurut Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab menekankan bahwa pendidikan adalah proses sistematis untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak baik. Substansi pendidikan Islam menurut Shihab adalah pendidikan akhlak yang membentuk tabiat baik secara bertahap. Kurikulum harus berorientasi pada pembentukan insan kamil atau manusia sempurna yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan kemuliaan akhlak. Proses ini menghasilkan perubahan progresif pada tingkah laku manusia secara berkelanjutan.

Abuddin Nata dalam kitab Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan menafsirkan bahwa kurikulum pendidikan Islam meliputi tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah Aqidah yang mencakup keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul-rasul, Hari Kiamat, serta *Qada* dan *Qadar* Allah. Dimensi kedua adalah Syariah yang meliputi segala amal perbuatan manusia berdasarkan hukum Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Dimensi ketiga adalah Akhlak atau Ihsan yang merupakan amalan melengkapkan kedua dimensi sebelumnya dan mengajarkan cara pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Perspektif Al-Ghazali dalam literatur tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah proses menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak baik secara sadar, terstruktur, dan sistematis agar tidak sia-sia. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang taat kepada Allah melalui proses yang tertata. Tanpa sistematika yang jelas, pendidikan menjadi tidak efektif dan tidak menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan.

Pada jenjang sekolah dasar, implementasi pendidikan inklusi menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks, antara lain keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran inklusi, serta keterbatasan dalam melakukan adaptasi dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut (Wahyuningsih, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kurikulum menjadi aspek yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

Pelaksanaan pendidikan inklusi dan manajemen kurikulum yang efektif merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, manajemen kurikulum harus dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Temuan penelitian dalam Jurnal ISEMA UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan bahwa manajemen kurikulum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan dan visi satuan pendidikan, sehingga efektivitas pengelolaan kurikulum menjadi

prasyarat penting bagi sekolah yang berorientasi pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusi, holistik, dan berkeadilan (Nurhadi, 2024).

Selain itu, pada satuan pendidikan yang menerapkan sistem inklusi, manajemen kurikulum berbasis keterampilan hidup (*life skill*) dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi (Wibowo, 2024). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung tidak hanya pada aspek kebijakan atau respons pelaksana, tetapi juga pada aspek manajerial.

Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung merupakan sekolah dasar swasta yang berlandaskan visi “*menjadi penyelenggara lembaga pendidikan dan lembaga nonpendidikan dengan pelayanan prima, islami, dan berjiwa wirausaha.*” Visi tersebut menegaskan komitmen sekolah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, berkarakter Islami, dan mendorong kemandirian peserta didik. Nilai pelayanan prima, keislaman, dan jiwa wirausaha menjadi landasan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusi adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (Azizah, 2025).

Keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah sangat bergantung pada efektivitas manajemen kurikulum dalam memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memperoleh layanan pendidikan yang sesuai (Yaasmin, 2024). Upaya pemenuhan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung diwujudkan melalui penyelenggaraan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang telah berjalan sejak 2016.

Berdasarkan dokumen Program Pembelajaran Individual (PPI) Tahun Pelajaran 2025–2026, program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) memperoleh layanan pembelajaran yang bersifat individual, berpusat pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Penyusunan PPI mencakup asesmen perkembangan anak, penentuan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, pemilihan metode dan media pembelajaran, serta

evaluasi kemajuan belajar yang dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim PPI yang terdiri dari kepala sekolah, koordinator kurikulum, guru kelas, guru pendamping khusus (*helper*), koordinator BK, dan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum pada 20 Oktober 2025, penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah masih menghadapi hambatan mendasar pada aspek pemenuhan kebutuhan operasional. Narasumber menegaskan bahwa permasalahan utama dalam implementasi layanan ini berpusat pada kurangnya sumber daya pendukung, khususnya keberadaan guru pendamping khusus (GPK) yang belum memadai untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Selain itu, kendala signifikan juga ditemukan pada keterbatasan sarana dan prasarana, di mana fasilitas layanan spesifik untuk PDBK seperti alat-alat terapi hingga saat ini belum terpenuhi. Keterbatasan pada aspek tenaga pendidik dan fasilitas terapi ini pada akhirnya berdampak langsung pada belum optimalnya penyesuaian layanan pendidikan individual di sekolah.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan PPI sebagai bagian dari layanan pendidikan inklusi dengan manajemen kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kurikulum seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik, baik reguler maupun Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), melalui adaptasi tujuan, materi, strategi pembelajaran, serta asesmen yang fleksibel. Karena itu, efektivitas manajemen kurikulum menjadi sangat menentukan keberhasilan model pendidikan inklusi yang diterapkan di sekolah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji manajemen kurikulum dan pendidikan inklusi pada berbagai jenjang pendidikan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi, strategi, maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi, tanpa menelaah secara mendalam hubungan manajemen kurikulum dengan model pendidikan inklusi khususnya pada sekolah dasar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana manajemen kurikulum memiliki hubungan dengan model pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung. Oleh

karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Hubungan Manajemen Kurikulum dengan Model Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung” sehingga menarik peneliti untuk menyelidiki fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan manajemen kurikulum di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung?
2. Bagaimana gambaran penerapan model pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung?
3. Bagaimana gambaran hubungan manajemen kurikulum dengan model pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan manajemen kurikulum di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung.
2. Untuk menggambarkan penerapan model pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung.
3. Untuk menggambarkan hubungan manajemen kurikulum dengan model pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Setiap kegiatan penelitian memberikan manfaat tidak hanya bagi subjek dan peneliti, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Penelitian ini berjudul “Hubungan Manajemen Kurikulum dengan Model Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung” diharapkan akan memberikan manfaat, terutama di dalam:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai keterkaitan antara manajemen kurikulum dengan penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

- b. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait implementasi kurikulum dalam konteks sekolah inklusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana manajemen kurikulum memiliki hubungan dengan keberhasilan penerapan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung.
- b. Diharapkan temuan penelitian ini memberi masukan penting bagi guru, tenaga kependidikan, serta kepala sekolah mengenai peran manajemen kurikulum dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan adaptif bagi semua peserta didik.

E. Kerangka Berpikir

Manajemen kurikulum dan kualitas kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar sangat penting untuk keberhasilan pendidikan inklusi. Kurikulum inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, dengan menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan teori Ornstein & Hunkins (2018) indikator manajemen kurikulum meliputi tiga aspek utama (Ode, 2021) meliputi:

1. *Learner Development* (perkembangan peserta didik) merupakan konsep yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Ornstein dan Hunkins (2018) menekankan bahwa kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, minat, kemampuan, serta tahap perkembangan peserta didik. Kurikulum tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada perkembangan intelektual, sosial, emosional, moral, dan fisik peserta didik secara menyeluruh.
2. *Quality of Learning Experiences* (kualitas pembelajaran) merupakan pengalaman yang mampu membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan yang bermakna, relevan, aktif, dan menantang. Kurikulum yang

dikelola dengan baik harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, serta kemampuan bekerja sama. Dengan demikian, keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran yang dialami peserta didik.

3. *Stakeholder Involvement* (keterlibatan pemangku kepentingan pendidikan) merupakan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Menurut Ornstein dan Hunkins (2018), kurikulum tidak dapat dikembangkan hanya oleh sekolah atau guru, tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, masyarakat, pemerintah, serta lembaga terkait lainnya. Keterlibatan *stakeholder* penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, dan perkembangan zaman. Selain itu, kerja sama yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat mendukung keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan.

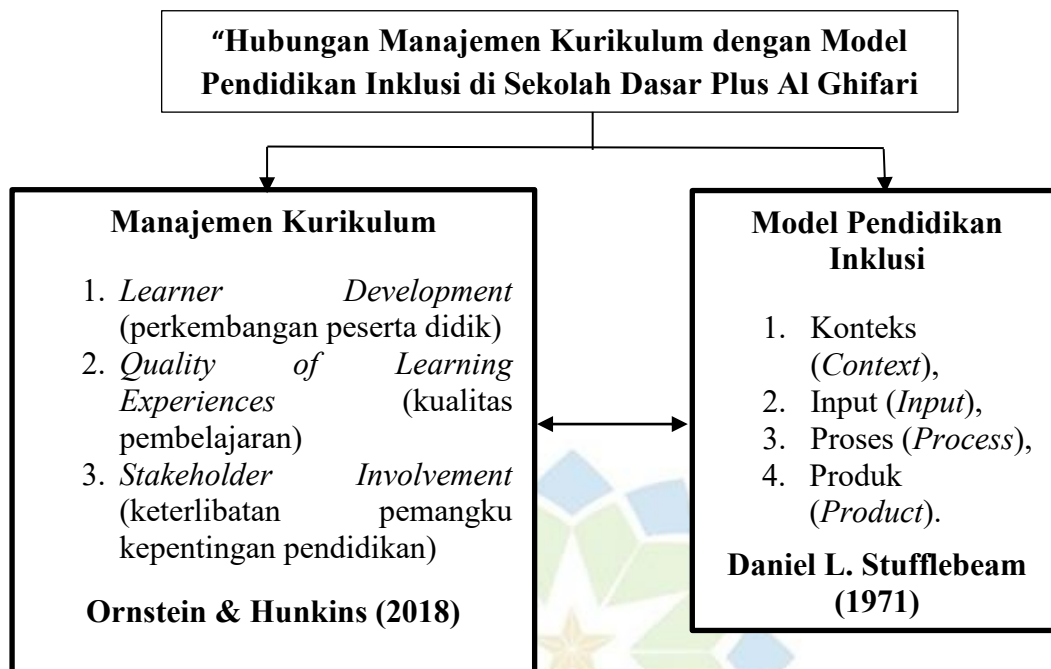
Melalui pengelolaan yang baik pada ketiga aspek tersebut, sekolah dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan relevan bagi seluruh peserta didik. Menurut Ainscow dan Sandill (2010), manajemen kurikulum dalam pendidikan inklusi harus memastikan bahwa segala aspek pembelajaran mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun peserta didik reguler, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan dalam akses pendidikan (Putri, 2025).

Model pendidikan inklusi menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dalam lingkungan belajar yang ramah dan mendukung. Kurikulum inklusi diharapkan mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik dengan cara yang responsif sehingga dapat mengembangkan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Menurut teori evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam (1971), indikator

model pendidikan inklusi dapat dianalisis menggunakan pendekatan CIPP (Rasyid, 2025), yang mencakup:

1. Konteks (*Context*) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, peluang, serta kondisi lingkungan yang menjadi dasar penyusunan suatu program. Evaluasi konteks bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
2. Input (*Input*) adalah evaluasi terhadap sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan program sebelum dilaksanakan serta menentukan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Proses (*Process*) adalah evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sedang berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan, melalui evaluasi proses, pengelola program dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan.
4. Produk (*Product*) adalah evaluasi terhadap hasil atau dampak yang diperoleh setelah program dilaksanakan. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang dievaluasi dapat berupa hasil jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum memiliki hubungan signifikan dengan keberhasilan model pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung. Manajemen kurikulum yang dirancang dengan baik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang adaptif akan mendukung terciptanya sistem pembelajaran yang inklusi dan berkeadilan bagi setiap peserta didik. Untuk memperjelas hubungan antarvariabel dalam penelitian ini, maka kerangka berpikir disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

↔ = Manajemen Kurikulum memiliki hubungan dengan Model Pendidikan Inklusi.

F. Hipotesis

H_0 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Manajemen Kurikulum dengan Model Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung.

H_a = Terdapat hubungan yang signifikan antara Manajemen Kurikulum dengan Model Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Plus Al Ghifari Bandung.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif pada SDS DCC Global dan	Fokus pada manajemen kurikulum inklusi	Lokasi studi di Bandar Lampung, menggunakan observasi,	Perencanaan menekankan kesetaraan, pelibatan berbagai

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	SD Insan Mandiri (Putri, 2025)	Sekolah Dasar .	wawancara, dokumentasi.	pihak, evaluasi aspek akademik dan sosial-emosional.
2.	Strategi Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif (Julinda Siregar, 2025)	Implementasi manajemen pendidikan inklusi.	Fungsi manajerial lengkap (<i>planning, organizing, actuating, controlling</i>) dengan diferensiasi .	Diferensiasi kurikulum dan kolaborasi guru optimalisasi manajemen inklusi.
3.	Tantangan dan Strategi Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif di TK Kota Yogyakarta (Hidayat, 2024)	Manajemen kurikulum pendidikan inklusi di usia dini.	Fokus di TK dengan metode survei kuantitatif.	Tingkat pelaksanaan manajemen kurikulum aspek perencanaan dan pelaksanaan masih rendah.
4.	Kebijakan dan Manajemen Kurikulum dalam Pendidikan Inklusif (Maiwahyu, 2025)	Kebijakan pada manajemen kurikulum Pendidikan inklusi.	Tinjauan pustaka kualitatif pada konteks pendidikan inklusi nasional.	Manajemen kurikulum efektif melalui perencanaan berbasis kebutuhan individu dan silabus fleksibel mendukung kesuksesan pendidikan inklusi.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
5.	Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusi pada Sekolah Dasar di Kota Bandar Lampung (Dini, 2025)	Fokus pada manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Dasar .	Lokasi di Sekolah Dasar Kota Bandar Lampung, melalui metode deskriptif kualitatif.	Menekankan tahap manajerial lengkap: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (RPP & PPI), dan evaluasi komprehensif (akademik, sosial-emosional, fisik-motorik, kemandirian).
6.	Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif di SDN 17 Jawa Gadut (Savitri, 2020)	Fokus pada manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Dasar .	Lokasi di SDN 17 Jawa Gadut; metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.	Menelaah pengelolaan kurikulum inklusi di sekolah negeri secara konkret pada praktik implementasinya.
7.	Mengoptimalkan Manajemen Kurikulum untuk Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar (Yaasmin, 2024)	Fokus pada manajemen kurikulum pendidikan inklusi di Sekolah Dasar .	Menggunakan metode <i>literature review</i> , menekankan kerja sama multipihak (kepala sekolah, guru, orang tua).	Manajemen kurikulum inklusi optimal melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi; guru sebagai faktor utama dengan dukungan perangkat sekolah untuk memaksimalkan inklusi.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
8.	Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusi di SD Plus Rahmat Kota Kediri (Rani, 2024)	Fokus pada manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Dasar .	Lokasi di SD Plus Rahmat; metode studi kasus kualitatif dengan observasi, wawancara, dokumentasi.	Menelaah kurikulum reguler dan Program Pembelajaran Individual (PPI) untuk siswa inklusi; membahas perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum inklusi di sekolah inklusi swasta.
9.	Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif di SDN 5 Arcawinangun Purwokerto Timur (Okta Wulandari, 2024)	Fokus pada manajemen kurikulum inklusi di Sekolah Dasar .	Lokasi di SDN 5 Arcawinangu melalui metode fenomenologi dengan subjek kepala sekolah, guru kelas, dan guru pendamping.	Kurikulum dimodifikasi sesuai kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK); Pengorganisasian meliputi pengaturan jadwal, alokasi waktu, dan penugasan; pelaksanaan dan pengawasan dilakukan bersama guru kelas dan pendamping.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
10.	Tujuan Implementasi Kurikulum pada Sekolah Pendidikan Inklusif di Kota Bandung (Suryana, 2024)	Fokus pada manajemen/ implementasi kurikulum inklusi di sekolah inklusi.	Lokasi di tiga SD Kota Bandung di antaranya SDN Tunas Harapan, SDN 138 Gerlong, SDN 206 Putraco Indah. Menggunakan metode kualitatif.	Menelaah penyelarasan/ modifikasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran inklusi, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi inklusi di sekolah reguler di Bandung.

